

## Dihantam Covid-19, PAD Tanah Laut Stabil



Sumber : <https://kalsel.antaranews.com/berita/207813/bapenda-realisisi-pad-tanah-laut-masih-stabil>

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan Surya Aripiani mengatakan, ditengah mewabahnya COVID-19 yang mengakibatkan terhambatnya aktivitas ekonomi, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Laut hingga triwulan ke III tahun 2020 masih relatif stabil.

Surya juga menyampaikan, capaian PAD Tanah Laut hingga saat ini mencapai 86 persen atau setara Rp 129.377.213.414,33 dari target PAD pada tahun 2020 yang ditentukan Pemkab Tanah Laut setelah terjadi refocusing anggaran. Capaian sebesar itu, dinilai menguntungkan dan sangat baik ditengah kondisi Tanah Laut yang masih dihadapkan dengan persoalan pandemi virus corona.

Lebih lanjut Kepala Bapenda Tanah Laut mengutarakan, kini pihaknya memberikan kemudahan dalam pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang bisa dibayarkan secara online. dimana Bisa melalui Bank Kalsel, PT Pos Indonesia, Alfamart dan Indomaret. dimana pihaknya akan menggali berbagai potensi pendapatan, diantaranya pajak parkir untuk gerai usaha retail perdagangan. Sementara itu, Bupati Tanah Laut HM Sukamta mengungkapkan, dirinya merasa sangat bersyukur karena ditengah pandemi virus corona PAD Kabupaten Tanah Laut masih terbilang aman.

Bupati Tanah Laut HM Sukamta mengungkapkan bahwa Ini suatu keberkahan, di kabupaten/kota se-Indonesia rata-rata PAD mereka jatuh dan terjun bebas, alhamdulillah kita masih aman. Itu artinya kebijakan kita ditengah pandemi ini sudah berada dijalan yang benar dan

lurus, Sukamta juga memberikan peringatan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemkab Tanah Laut agar segera melakukan percepatan realisasi anggaran.

dimana , Sukamta mengatakan bahwa Saya gemetar saat ada penambahan anggaran kemarin diketok di DPRD, waktu kita kurang lebih 50 hari efektif kerja anggaran itu harus kita realisasikan secepatnya dan sebaik-baiknya. Jika asal-asalan, maka akan tersangkut masalah hukum.

Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Triwulan III tahun 2020 Lingkup Pemkab Tanah Laut tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tanah Laut Andris Evony, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tanah Laut Muhammad Darmin, asisten staf ahli lingkup Setda Tanah Laut dan kepala bagian lingkup Setda Tanah Laut. Selain itu, Kegiatan tersebut juga diikuti oleh seluruh SKPD, camat dan lurah se-Tanah Laut. (Sumber Sumber : <https://kalsel.antaranews.com/berita/207813/bapenda-realisisi-pad-tanah-laut-masih-stabil>)

Hantaman Covid-19 relatif tak berpengaruh terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Laut. Dari hasil monitoring dan evaluasi pembangunan triwulan III tahun 2020, diketahui bahwa realisasi PAD Tala telah mencapai 86 persen dari target atau senilai Rp129,3 miliar Menurut Sukamta, fakta itu menunjukkan kebijakan yang diambil Pemkab Tala di tengah pandemi ini sudah berada di jalan yang benar. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tala Surya Aripani menambahkan bahwa pihaknya terus berupaya menggenjot PAD dengan cara menggali berbagai potensi pendapatan, diantaranya pajak parkir untuk gerai usaha retail perdagangan. Selain itu, upaya untuk mendongkrak pemasukan bagi daerah juga dilakukan dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar pajak. Seperti Pajak Bumi dan Bangunan bisa dibayarkan secara daring melalui bank atau kantor pos.

(Sumber : <https://rri.co.id/banjarmasin/ekonomi/918238/dihantam-covid-19-pad-tanah-laut-stabil>.)

### **Sumber Berita:**

1. <https://rri.co.id/> , *Pulihkan Ekonomi, Tanah Laut Giatkan Padat Karya*, 09 Desember 2020, 08.00 WITA.
2. Sumber : <https://rri.co.id/>, *Dihantam Covid-19, PAD Tanah Laut Stabil*, 09 Desember 2020, 08.00 WITA.

**Catatan:**

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

**Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu